SADHARANANIKARANA:
Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENCOPOTAN MENTERI PURBAYA YUDHI SADEWA DALAM KAJIAN *TRI KAYA PARISUDHA*

Oleh :
I Nyoman Dhani Satyadinatha [1], I Komang Widya Purnama Yasa[2]
LPMPP Universitas Mataram [1,] Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram[2]
Email: satyadinatha93@gmail.com [1], komang.yasa1990@gmail.com[2]

Abstract

The political communication dynamics following a cabinet reshuffle frequently generate intense discourse contestation across digital mass media platforms. The dismissal of Purbaya Yudhi Sadewa from the strategic position of Minister of Finance by the President of the Republic of Indonesia in September 2026 emerged as a critical national issue. Online news portals framed this sudden executive decision through divergent perspectives: ranging from constitutional executive prerogatives, controversial records of fiscal management, internal bureaucratic resistance, to suspected political friction triggered by public disclosures of tax evasion by multinational steel corporations. This study investigates how four prominent Indonesian online news portals Detik.com, Tempo.co, Kumparan.com, and Indopolitika.com constructed this termination using Zhongdang Pan and Gerald M. Kosickis framing model (Syntactic, Script, Thematic, and Rhetorical structures), scrutinized through the ethical lens of Tri Kaya Parisudha (Manacika, Wacika, and Kayika). Adopting a constructivist qualitative paradigm, the findings demonstrate distinct structural packaging: Detik.com and Kumparan.com anchored their frames on administrative governance and economic policy records; Tempo.co deconstructed power conflicts and elite friction; while Indopolitika.com highlighted the temporal causality anomaly between the exposure of tax leakages and the immediate dismissal. In the philosophical framework of Tri Kaya Parisudha, these representations unveil an ethical disconnect between administrative intent (Manacika), transparent political rhetoric (Wacika), and executive maneuvers (Kayika).

Keywords: Framing, Media Online, Purbaya Yudhi Sadewa, Tri Kaya Parisudha.

I. Pendahuluan

Transformasi lanskap komunikasi massa di era digital kontemporer telah menempatkan media siber sebagai episentrum utama produksi, reproduksi, dan sirkulasi wacana publik di Indonesia. Perkembangan teknologi siber tidak semata-mata mengubah medium transmisi pesan dari analog ke digital, melainkan merombak tatanan ekonomi-politik ruang redaksi, rutinitas kerja wartawan, serta pola konsumsi masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan (Kurniawan & Astuti, 2021). Karakteristik jurnalisme daring di Indonesia yang menuntut penyajian informasi instan (*real-time*),

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

fragmentasi berita dalam isu kebaharuan (*continuous updating*), serta ketergantungan pada metrik klik (*click-driven journalism*) memaksa redaksi bekerja dalam akselerasi industri yang sangat ketat (Nugroho & Syarif, 2022). Kondisi ini mengakibatkan asas objektivitas dan netralitas yang selama ini menjadi kanon fundamental jurnalisme sering kali terpinggirkan. Media daring tidak lagi beroperasi sebagai cermin realitas yang pasif, melainkan bertindak sebagai institusi ekonomi-politik yang aktif menyeleksi dan membingkai peristiwa sosial-politik berdasarkan preferensi ideologis serta kepentingan pemilik modal (Haryanto, 2021).

Dalam perspektif teori konstruksionisme sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial sejatinya tidak pernah hadir secara mandiri di luar pemaknaan manusia, melainkan merupakan hasil dialektika simultan melalui momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Darma, 2022). Ketika konsep konstruksionisme ini ditarik ke dalam ranah jurnalistik di Indonesia, peristiwa politik tidak pernah sampai kepada khalayak dalam wujud fakta mentah yang steril. Jurnalis dan institusi media bertindak sebagai konstruksi realitas yang membubuhkan makna subjektif pada suatu fakta melalui strategi penonjolan aspek tertentu (*salience*) dan peminggiran aspek lainnya (*omission*) (Sobur, 2021). Fakta-fakta yang dipilih secara selektif tersebut kemudian dikonstruksi menjadi sebuah berita utuh yang dipersepsikan publik sebagai representasi kebenaran faktual. Padahal, teks berita tersebut merupakan produk interpretatif yang sarat dengan bias institusional dan agenda kekuasaan tertentu (Eriyanto, 2021).

Perdebatan wacana dan konstruksi realitas media tersebut mengemuka secara nyata dalam peristiwa perombakan kabinet (*reshuffle*) pada pertengahan September 2026, khususnya keputusan Presiden RI mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Sebagai jangkar stabilitas fiskal dan pemegang otoritas kebijakan moneter-ekonomi negara, figur Menteri Keuangan memiliki bobot strategis yang menentukan tingkat sentimen pasar modal dan stabilitas makroekonomi nasional (Prasetyo & Wibowo, 2023). Keputusan pemberhentian yang berlangsung secara mendadak ini mengejutkan publik, mengingat Purbaya baru mengemban amanah tersebut selama kurang lebih satu tahun setelah

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

menggantikan menteri sebelumnya. Ketiadaan penjelasan resmi yang transparan dan komprehensif dari pihak Istana Kepresidenan terkait dasar evaluasi substantif pemecatan membuka ruang interpretasi yang sangat cair di ruang redaksi media online, yang segera memproduksi bingkai interpretatif masing-masing guna mendefinisikan latar di balik keputusan eksekutif tersebut (Kusuma & Putri, 2022).

Dramatisasi naratif seputar peristiwa pencopotan ini semakin menguat akibat rangkaian kronologis kejadian yang dinilai publik sarat anomali administratif dan etika pemerintahan. Purbaya Yudhi Sadewa menerima panggilan telepon penting yang menandai berakhirnya masa jabatannya tepat ketika sedang menghadiri rapat kerja resmi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kompleks Parlemen Senayan. Interupsi sambungan telepon tersebut terjadi hanya berselang beberapa saat setelah Purbaya memaparkan temuan audit kritis mengenai dugaan pembangkangan kewajiban perpajakan oleh 40 perusahaan baja asing dengan potensi kerugian penerimaan negara mencapai ratusan miliar hingga mendekati Rp1 triliun. Kepergian mendadak Purbaya dari forum konstitusional parlemen yang disusul pelantikan menteri baru pada sore hari yang sama seketika menciptakan ruang kosong wacana yang sangat sensitif, mengundang media untuk berlomba-lomba memproduksi tafsir kausalitas di balik keputusan eksekutif tersebut (Fadillah & Rahmawati, 2023).

Kekosongan konfirmasi resmi dari lingkar eksekutif dimanfaatkan oleh berbagai portal media online nasional untuk mengonstruksi realitas berdasarkan garis redaksional masing-masing. Media arus utama seperti Detik.com dan Kumparan.com cenderung mengemas peristiwa ini dalam koridor hukum formal dengan menonjolkan hak prerogatif presiden serta riwayat friksi manajerial terkait penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Bank Himbara dan perombakan pejabat internal eselon I Kementerian Keuangan (Santoso & Hidayat, 2023). Sebaliknya, media dengan tradisi jurnalisme kritis seperti Tempo.co dan media independen seperti Indopolitika.com mengarahkan sorotan tajam pada anomali kronologis antara pembongkaran skandal penunggakan pajak korporasi baja dengan pembebasan tugas menteri, sehingga memicu kecurigaan publik mengenai adanya intervensi kekuatan oligarki ekonomi-politik terhadap kekuasaan negara (Mietzner & Muhtadi, 2021). Perbedaan pembingkaian ini

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

membuktikan bahwa media siber di Indonesia beroperasi dalam tarikan kepentingan ideologi dan relasi kuasa yang kompleks (Nugroho & Syarif, 2022).

Dalam membedah kompleksitas teks berita politik tersebut secara sistematis, pendekatan analisis framing yang dirumuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) menyediakan kerangka operasional yang sangat komprehensif. Pan dan Kosicki membagi instrumen pembingkaian wacana media ke dalam empat perangkat struktural teks: sintaksis (cara wartawan menyusun fakta melalui piramida terbalik, judul, teras berita, latar informasi, dan kutipan sumber), skrip (pola penceritaan peristiwa berbasis formula kelengkapan 5W+1H), tematik (hubungan logis antar-proposisi kalimat yang membentuk tesis berita), serta retoris (pilihan kata, leksikon, metafora, dan elemen visual guna memperkuat citra subjek) (Darma, 2022). Keempat dimensi ini memungkinkan pembongkaran struktur teks berita secara mikro sekaligus menyingkap motif ideologis makro di balik penyusunan teks pemberitaan politik di Indonesia (Prastiwi & Irwansyah, 2021).

Kajian framing atas wacana media di Indonesia yang selama ini bertumpu pada teori-teori strukturalisme Barat kerap kali mengabaikan dimensi etika kepemimpinan dan nilai-nilai moralitas lokal (*indigenous wisdom*) Nusantara. Padahal, dalam kosmologi politik dan komunikasi masyarakat Indonesia, legitimasi kekuasaan berkaitan erat dengan keselarasan moral, kejujuran budi, dan etika kepemimpinan luhur (Wardana, 2021). Dalam konteks kearifan filsafat Hindu, ajaran *Tri Kaya Parisudha* memegang posisi sentral sebagai pedoman etika moralitas universal. Ajaran ini menegaskan bahwa integritas kepemimpinan bertumpu pada kesucian tiga pilar yang tidak terpisahkan yaitu *Manacika* (kemurnian pikiran dan niat), *Wacika* (kebenaran dan keterbukaan tutur kata), serta *Kayika* (kesucian dan kepatutan dalam perbuatan nyata) (Wiana, 2022).

Dalam ranah komunikasi dan penerangan Hindu, penerapan *Tri Kaya Parisudha* menjadi instrumen etis untuk mengevaluasi perilaku komunikasi para elite politik (*dharma kshatriya*) sekaligus diskursus wacana yang diproduksi oleh institusi pers (Putra & Sudarsana, 2022). Dinamika pencopotan menteri keuangan di tengah agenda rapat pembongkaran kebocoran pajak memunculkan pertanyaan moral yang sangat

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

mendasar yaitu apakah kebijakan eksekutif tersebut mencerminkan keselarasan *Tri Kaya Parisudha*, ataukah memperlihatkan disonansi etika, di mana tindakan politik (*Kayika*) bertolak belakang dengan transparansi narasi publik (*Wacika*) dan didorong oleh motif kekuasaan yang tersembunyi (*Manacika* yang terdistorsi oleh kepentingan transaksional). (Adnyana, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia telah mengkaji pembingkaian media terhadap figur menteri dan dinamika kabinet (Wahyuni & Anshori, 2022). Namun, sebagian besar literatur tersebut membatasi diri pada analisis deskriptif teks jurnalistik semata tanpa mempertautkannya dengan pisau analisis etika kepemimpinan keagamaan atau kearifan spiritual lokal. Penelitian ini mengisi celah kebaruan (*novelty gap*) tersebut dengan menyandingkan model framing teks Pan dan Kosicki bersama konsep filsafat moralitas *Tri Kaya Parisudha*, menghasilkan terobosan konseptual dalam memahami keterkaitan antara diskursus media modern dan etika komunikasi Hindu (Sudiarta, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengangkat topik tentang Analisis Framing Pemberitaan Pencopotan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa Dalam Kajian *Tri Kaya Parisudha*. Batasan pada penelitian ini merupakan amatan komparatif pada empat portal media siber nasional yaitu Detik.com, Tempo.co, Kumparan.com, dan Indopolitika.com. Pemilihan keempat portal ini didasarkan pada variasi tipologi jurnalistik: Detik.com merepresentasikan jurnalisme cepat berbasis kutipan narasumber formal; Tempo.co mengusung jurnalisme investigatif yang kritis; Kumparan.com memadukan jurnalisme digital berbasis evaluasi performa kebijakan; sedangkan Indopolitika.com menonjolkan fokus politik yang sensitif terhadap anomali kekuasaan. Kajian ini bertujuan membongkar strategi framing keempat media tersebut sekaligus menelaah maknanya secara kritis dalam terang filosofi etika *Tri Kaya Parisudha*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivisme dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial bukanlah entitas tunggal yang beku di luar kesadaran manusia, melainkan hasil bentukan konstruksi diskursif yang dimediasi oleh bahasa, struktur kekuasaan, dan

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

ideologi institusi media (Creswell & Poth, 2021). Upaya membongkar mekanisme pembentukan realitas tersebut, metode yang digunakan adalah Analisis Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993). Pendekatan ini mengoperasionalkan teks berita ke dalam empat dimensi struktural yang saling bertaut yaitu struktur sintaksis (bagan berita, judul, teras berita, latar informasi, dan atribusi sumber kutipan), struktur skrip (pola pengemasan narasi berbasis formula kelengkapan peristiwa 5W+1H), struktur tematik (koherensi proposisi antar-kalimat dan logika kausalitas tema), serta struktur retoris (pilihan leksikon/diksi, idiom, gaya bahasa, dan penonjolan visual) (Eriyanto, 2021). Korpus data dalam penelitian ini berfokus pada artikel berita utama yang dipublikasikan oleh empat portal berita daring terkemuka di Indonesia, yaitu Detik.com, Tempo.co, Kumparan.com, dan Indopolitika.com, yang meliput secara langsung dinamika pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa pada momentum peristiwa pertengahan September 2026.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi arsip digital daring (*online digital documentation*) dengan menghimpun artikel berita primer dari keempat portal tersebut menggunakan kata kunci spesifik dan kriteria kesesuaian unit analisis. Data yang dihimpun kemudian dianalisis melalui tahapan koding kualitatif, di mana setiap segmen teks berita diklasifikasikan ke dalam matriks framing empat perangkat Pan dan Kosicki guna memetakan divergensi strategi pembingkaian antar-media (Saldaña, 2021). Selanjutnya, hasil pemetaan empiris tersebut diinterpretasikan secara mendalam (*thick description*) dan dianalisis secara dialektis menggunakan kerangka filsafat etika Hindu Nusantara, yakni *Tri Kaya Parisudha*, yang membedah keterkaitan moral antara alam pikiran (*Manacika*), komunikasi tutur kata (*Wacika*), dan perbuatan tindakan nyata (*Kayika*) para elite politik yang dihadirkan dalam diskursus media (Suadnyana, 2021). Upaya menjamin keabsahan data kualitatif, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teoretis, serta audit keterandalan analisis wacana guna memastikan bahwa seluruh simpulan interpretatif berpijak secara konsisten pada korpus data tekstual yang sahih (Flick, 2022).

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

III. Pembahasan

Pada penelitian ini diperoleh hasil pembahasan mengenai Pemetaan Struktural Framing Teks Berita (Model Pan & Kosicki), Dekonstruksi Diskursus Media dalam Perspektif Etika *Tri Kaya Parisudha*, *dan* Disonansi Etika Komunikasi Kekuasaan Kontemporer.

Pemetaan Struktural Framing Teks Berita (Model Pan & Kosicki)

Hasil analisis tekstual terhadap empat portal media daring memperlihatkan fragmentasi wacana yang sangat kontras dalam membingkai peristiwa pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Setiap portal memanfaatkan perangkat struktural framing untuk mengarahkan kesadaran khalayak pada sudut pandang tertentu, sebagaimana dipetakan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Framing Model Pada Pemberitaan
Pencopotan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa

Struktur Framing	Detik.com	Tempo.co	Kumparan.com	Indopolitika.com
Sintaksis	Piramida terbalik formal. Lead menyoroti hak prerogatif presiden dan sertijab. Latar berita memuat pengakuan santai Purbaya soal rotasi pejabat eselon kementerian. Kutipan didominasi pejabat resmi.	Deduktif investigatif. Headline mempertanyakan motif mendasar (Mengapa Purbaya Dicopot...). Lead menelusuri dinamika di balik layar kabinet. Kutipan mencakup analis politik dan narasumber internal.	Breaking news terstruktur. Lead menonjolkan durasi satu tahun masa jabatan. Latar diisi riwayat kebijakan kontroversial (dana SAL dan perbankan Himbara) serta rekam jejak akademis Purbaya.	Penjajaran kronologis dramatis. Headline dan lead mempertentangkan rapat pembongkaran skandal pajak baja di DPD RI dengan interupsi telepon pemecatan mendadak dan pelantikan sore hari.
Skrip (5W+1H)	Dominan pada unsur *What* (pencopotan), *Who* (Prabowo, Purbaya,	Sangat menonjolkan unsur *Why* (akar politis perombakan)	Fokus pada unsur *What*, *When* (tepat setahun menjabat), dan	Menitikberatkan relasi kausalitas unsur *When* dan *Why* (korelasi rentang waktu

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

	Suahasil), dan *How* (proses sertijab). Unsur *Why* dinarasikan sebatas dinamika rotasi internal kementerian.	dan *Who* (konstelasi relasi elite kekuasaan). Unsur How diurai lewat manuver fraksi kabinet.	*Why* (akumulasi risiko kebijakan moneter dan fiskal selama masa jabatan).	beberapa jam antara pengungkapan kebocoran pajak baja dan pembebasan tugas menteri).
Tematik	Tema stabilitas birokrasi dan kepatuhan administratif. Pergantian menteri diposisikan sebagai hal rutin dan lumrah dalam sistem presidensial.	Tema konflik kepentingan elite dan resistensi politik. Pencopotan diposisikan sebagai konsekuensi dari benturan agenda kekuasaan internal kabinet.	Tema evaluasi kinerja teknokratis. Pemecatan dibingkai sebagai konsekuensi logis dari kebijakan fiskal non-konvensional yang kerap memicu polemik pasar.	Tema anomali keadilan penegakan hukum fiskal. Menyoroti adanya potensi intervensi kekuatan tertentu terhadap komitmen audit penerimaan negara.
Retoris	Leksikon santai dan menerima: hak prerogatif, fifty-fifty, suka-suka menteri, bisa tidur nyenyak, ingin pensiun dan mancing. Visualisasi foto figur tersenyum lepas.	Leksikon analitis dan sarat tensi politik: gonjang-ganjing, manuver kabinet, tarik-menarik kekuasaan, resistensi. Visualisasi pose berpikir serius.	Leksikon teknis ekonomi-fiskal: kebijakan kontroversial, dana SAL, Bank Himbara, defisit APBN. Visualisasi arsip foto rapat Banggar DPR.	Leksikon konspiratif dan skeptis: berlangsung mendadak, permainan oknum, dugaan kebocoran, fakta vs spekulasi. Foto tunggal formal berjarak.

Secara sintaksis, keempat portal media daring memperlihatkan strategi penataan fakta yang sangat berbeda untuk mengonstruksi signifikansi peristiwa di mata pembaca (Eriyanto, 2021). Detik.com memilih format piramida terbalik yang mengedepankan aspek prosedural hukum tata negara, di mana keputusan Presiden Prabowo Subianto diposisikan sebagai premis konstitusional mutlak yang tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Penataan teras berita (*lead*) pada Detik.com secara konsisten mengutip pernyataan

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

santai Purbaya usai serah terima jabatan (sertijab), yang menyatakan bahwa pergantian menteri merupakan hak mutlak pimpinan pemerintahan. Strategi sintaksis ini berhasil menciptakan efek penenangan wacana (*depoliticization*), menggiring publik untuk memandang pencopotan tersebut sebagai pergantian rutin aparatur birokrasi biasa (Santoso & Hidayat, 2023). Sebaliknya, Indopolitika.com merancang struktur sintaksis dengan strategi penjajaran waktu secara dramatis (temporal juxtaposition). Teras berita Indopolitika.com secara gamblang mempertentangkan keberanian Purbaya memaparkan audit potensi kebocoran pajak 40 pabrik baja di hadapan DPD RI pada siang hari dengan interupsi telepon penting yang membuatnya meninggalkan ruangan, disusul pelantikan menteri baru pada sore hari yang sama. Penataan sintaksis semacam ini secara kognitif membimbing pembaca untuk mencurigai adanya hubungan kausalitas tersembunyi antara pengungkapan skandal penerimaan negara dengan pemberhentian jabatan publik tersebut (Fadillah & Rahmawati, 2023).

Pada aspek struktur skrip, penerapan formula 5W+1H memperlihatkan segmentasi kedalaman peliputan berita yang tajam di antara media siber Indonesia (Prastiwi & Irwansyah, 2021). Detik.com dan Kumparan.com memberikan bobot utama pada unsur *What* (peristiwa pencopotan dan penunjukan menteri baru) serta *Who* (para aktor kunci di lingkaran eksekutif), sementara unsur *Why* (mengapa pencopotan dilakukan) hanya dijawab melalui penjelasan administratif yang dangkal. Kumparan.com, misalnya, mengisi unsur *Why* dengan menghubungkannya pada kompilasi kebijakan moneter kontroversial Purbaya di masa lalu, seperti manuver pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank BUMN. Kontras dengan hal tersebut, Tempo.co dan Indopolitika.com menempatkan unsur *Why* sebagai episentrum analisis. Tempo.co membedah dimensi *Why* melalui penelusuran friksi politik antar-faksi di dalam kabinet, sedangkan Indopolitika.com mengunci narasi pada unsur *When* dan *Why*. Indopolitika.com mempertanyakan urgensi waktu pemecatan: mengapa seorang menteri keuangan yang sedang menjalankan tugas konstitusional membongkar kebocoran anggaran negara tiba-tiba harus dicopot dalam hitungan jam tanpa penjelasan resmi dari Istana. Eksploitasi unsur waktu ini menjadi alat investigatif untuk

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

merangsang daya kritis khalayak terhadap klaim stabilitas pemerintah (Kusuma & Putri, 2022).

Ditinjau dari struktur tematik, koherensi logis antar-proposisi kalimat yang dibangun redaksi menghasilkan simpulan tema yang saling bertolak belakang (Darma, 2022). Detik.com dan Kumparan.com menyusun proposisi teks yang bermuara pada tema stabilitas fiskal dan akuntabilitas kinerja teknokratis. Teks disusun sedemikian rupa sehingga pemecatan Purbaya diposisikan sebagai langkah rasional untuk menyelematkan kredibilitas pasar keuangan yang sempat bergejolak (Prasetyo & Wibowo, 2023). Di sisi lain, Tempo.co dan Indopolitika.com membangun struktur tematik di seputar tema hegemoni kekuasaan dan resistensi status quo oligarki. Rangkaian kalimat pada Indopolitika.com menghubungkan keengganan aparat pajak memeriksa 40 pabrik baja dengan keberadaan permainan oknum di lingkungan birokrasi, yang kemudian berujung pada penghentian langkah politik sang menteri. Tema yang terbentuk adalah potret rentannya aparatur negara yang berintegritas ketika bersentuhan dengan kepentingan modal raksasa (Mietzner & Muhtadi, 2021).

Pada struktur retoris, pemilihan kata (leksikon), idiom, serta pilihan visualisasi gambar memainkan peran vital dalam memantapkan citra para aktor politik (Sobur, 2021). Detik.com mendominasi laporannya dengan leksikon bernada pasrah dan profan, seperti suka-suka menteri, *fifty-fifty*, ingin pensiun dan mancing, serta bisa tidur nyenyak. Leksikon ini, dipadukan dengan foto Purbaya yang tersenyum santai pasca-sertijab, menampilkan sosok pejabat yang legawa dan ikhlas melepaskan jabatan tanpa dendam politik. Sebaliknya, Indopolitika.com memilih leksikon yang sarat ketegangan investigatif, seperti berlangsung mendadak, permainan oknum, dugaan kebocoran, serta mempertentangkan fakta versus spekulasi. Diksi-diksi ini secara psikologis menyuntikkan kecurigaan ke benak khalayak dan menolak narasi simplifikasi yang disodorkan oleh media arus utama. Pilihan retoris ini menegaskan posisi Indopolitika.com sebagai media alternatif yang berupaya membongkar tabir di balik panggung depan kekuasaan formal (Nugroho & Syarif, 2022).

Dekonstruksi Diskursus Media dalam Perspektif Etika *Tri Kaya Parisudha*

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Analisis tekstual melalui model Pan dan Kosicki di atas membuktikan bahwa berita politik tidak pernah berada di ruang hampa nilai. Ketika diskursus media tersebut dibedah melalui kacamata filsafat etika Hindu Nusantara *Tri Kaya Parisudha*, tersingkap dimensi moralitas kepemimpinan yang mendalam. *Tri Kaya Parisudha* menuntut adanya keselarasan mutlak antara alam pikiran yang suci (*Manacika*), kejujuran tutur kata (*Wacika*), dan kepatutan perbuatan nyata (*Kayika*) (Suadnyana, 2021). Pertarungan wacana di empat media daring tersebut merefleksikan terjadinya krisis keselarasan tiga pilar moralitas ini dalam panggung politik nasional:

Pada *Manacika* Parisudha (Kemurnian Pikiran dan Niat Kepemimpinan). Dalam ajaran etika Hindu, *Manacika* menempati hierarki tertinggi karena alam batin dan pikiran (citta) merupakan sumber penggerak utama seluruh perbuatan manusia (Sudiarta, 2021). Kitab Sarasamuccaya (Sloka 79-80) menegaskan bahwa pikiran yang suci adalah pengendali hawa nafsu egoistik, keserakahan (*lobha*), dan kemurkaan (*krodha*). Seorang pemimpin yang memegang mandat kekuasaan wajib mendasarkan setiap keputusannya pada *Manacika* yang murni, yakni niat tulus demi kesejahteraan masyarakat luas (*lokasamgraha*) dan penegakan kebenaran (*dharma*) (Adnyana, 2023). Dalam pemberitaan Detik.com dan Kumparan.com, *Manacika* kepemimpinan Presiden RI dikonstruksi secara positif: keputusan mencopot menteri dibingkai sebagai iktikad luhur untuk menata efektivitas birokrasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meredam gejolak pasar akibat kebijakan fiskal yang kontroversial. Niat eksekutif dinarasikan murni demi kepentingan pembangunan nasional. Namun, pembingkaian teks pada Tempo.co dan Indopolitika.com menyingkap sisi gelap dari *Manacika* kekuasaan. Upaya mengaitkan pemecatan pada pengungkapan audit pajak puluhan korporasi baja, teks berita memunculkan keraguan mendalam mengenai kemurnian niat tersebut yaitu apakah keputusan perombakan kabinet benar-benar didasari oleh pertimbangan kinerja, ataukah telah terkooptasi oleh niat terselubung untuk melindungi jejaring modal oligarki dari jerat kewajiban perpajakan. Ketika niat kepemimpinan tercemar oleh kompromi transaksional politik, maka prinsip *Manacika Parisudha* telah runtuh, menghasilkan kebijakan yang mencederai keadilan publik (Wardana, 2021; Yasa, 2022).

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Pada *Wacika Parisudha* (Kejujuran Tutur Kata dan Keterbukaan Komunikasi Publik). Pilar kedua, *Wacika Parisudha*, mewajibkan manusia untuk senantiasa berkata yang jujur, benar, dan tidak menyesatkan (*satya wacana*). Dalam etika komunikasi publik, *Wacika* menuntut transparansi narasi dan pertanggungjawaban informasi dari pemegang kekuasaan kepada rakyat. Pejabat publik dilarang menyembunyikan kebenaran di balik retorika palsu atau eufemisme manipulatif (Putra & Sudarsana, 2022). Hasil analisis teks memperlihatkan kontras yang tajam mengenai implementasi *Wacika* ini. Pada figur Purbaya Yudhi Sadewa, media daring menggambarkan praktik *Wacika* yang sangat berani dan transparan. Di ruang sidang DPD RI, Purbaya tidak ragu mengartikulasikan fakta mengenai pembangkangan pajak industri asing dan adanya indikasi kongkalikong oknum petugas pemeriksa. Bahkan pasca pencopotan, Purbaya secara jujur berbicara di hadapan jurnalis Detik.com bahwa perombakan pejabat internal yang ia lakukan kemungkinan besar memicu ketidaksukaan pihak-pihak tertentu. Purbaya merefleksikan keberanian berkata benar (*satya*) tanpa terjebak pada kepura-puraan birokrasi (Ginaya et al., 2022). Sebaliknya, teks media membingkai adanya defisit *Wacika* yang mencolok dari otoritas Istana. Pemerintah memilih bungkam dan enggan menyampaikan alasan fundamental pemecatan di hadapan publik secara akuntabel. Keheningan dan pengabaian transparansi ini mencerminkan kegagalan memenuhi standar *Wacika* Parisudha. Ketiadaan komunikasi yang jujur menciptakan polusi wacana (*mithya wacana*) yang memaksa ruang publik terjerumus dalam pusaran spekulasi dan prasangka liar (Astawa, 2021).

Pada *Kayika* Parisudha (Kepatutan Tindakan Nyata dan Kesantunan Birokrasi). Pilar ketiga, *Kayika* Parisudha, menekankan keluhuran dalam perbuatan fisik dan kepatutan dalam bertindak nyata (*sad acara*). Kewenangan hukum yang sah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban etis atas cara (*manner*) suatu tindakan dieksekusi di ranah publik (Suadnyana, 2021). Media daring merefleksikan kontradiksi mendalam pada dimensi *Kayika* ini. Di satu sisi, langkah Purbaya merombak birokrasi internal dan memerintahkan pemeriksaan wajib pajak nakal dikonstruksi sebagai perbuatan nyata (*Kayika*) yang sejalan dengan *dharma* penegakan hukum negara. Tindakan tersebut merupakan bentuk perbuatan berani demi menyelamatkan kas negara. Namun di sisi

2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

lain, eksekusi pemecatan yang dilakukan melalui sambungan telepon saat sang menteri tengah menghadiri rapat kerja resmi lembaga negara (DPD RI) dibingkai media sebagai anomali etika tata kelola pemerintahan yang mencederai kesantunan politik (Kurniawan & Astuti, 2021). Meskipun secara hukum tata negara presiden memiliki hak prerogatif mutlak, tata cara pemecatan yang tergesa-gesa di tengah forum parlemen memperlihatkan ketidakpatutan etika kepemimpinan. Dalam pandangan *Kayika* Parisudha, tindakan fisik yang menabrak tata krama dan kehormatan lembaga menunjukkan keterputusan antara legalitas kekuasaan formal dengan kemuliaan moralitas tindakan.

Disonansi Etika Komunikasi Kekuasaan Kontemporer

Melalui penggabungan analisis framing struktural Pan & Kosicki dan tinjauan etika filsafat *Tri Kaya Parisudha*, penelitian ini berhasil menyingkap fenomena disonansi etika komunikasi kekuasaan di era digital Indonesia (Darma, 2022). Keempat media online yang diteliti secara gamblang merefleksikan ketidaksinkronan antara apa yang dipikirkan (*Manacika*), apa yang diucapkan (*Wacika*), dan apa yang diperbuat (*Kayika*) oleh para aktor politik. Ketika media arus utama seperti Detik.com dan Kumparan.com berupaya membatasi wacana pada aspek legalitas administratif, media kritis seperti Tempo.co dan Indopolitika.com membongkar adanya kerapuhan etika di balik keputusan tersebut. Teks berita menunjukkan bahwa integritas fiskal dan komitmen penegakan hukum perpajakan sering kali harus takluk di hadapan kepentingan pragmatisme kekuasaan yang tidak transparan (Mietzner & Muhtadi, 2021).

Secara epistemologis, temuan ini memperkuat dugaan bahwa analisis teks media dalam konteks keindonesiaan membutuhkan instrumen etika yang berakar pada kearifan lokal Nusantara (Wardana, 2021). *Tri Kaya Parisudha* bukan sekadar doktrin teologis Hindu yang bersifat statis, melainkan kerangka evaluasi kritis terhadap diskursus komunikasi publik dan moralitas kepemimpinan bangsa. Kegagalan para elite politik dalam menyelaraskan *Manacika*, *Wacika*, dan *Kayika* sebagaimana tercermin dalam framing media online menjadi bukti nyata terjadinya degradasi moralitas kepemimpinan kontemporer (Yasa, 2022). Media massa dalam perannya sebagai pilar keempat

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

demokrasi memiliki tanggung jawab etis untuk tidak sekadar melanggengkan eufemisme kekuasaan, melainkan membongkar kepalsuan wacana demi menegakkan kesucian nilai kebenaran dan keadilan publik.

IV. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa empat portal media siber nasional (Detik.com, Tempo.co, Kumparan.com, dan Indopolitika.com) mengonstruksi realitas peristiwa pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui strategi pembingkaian struktural yang berbeda-beda, sejalan dengan orientasi ideologis dan ekonomi-politik institusi redaksi masing-masing. Detik.com membingkai peristiwa dalam koridor kepatuhan administratif dan penerimaan hak prerogatif eksekutif dengan menonjolkan sikap tenang dan santai subjek pasca-pemberhentian. Tempo.co membongkar peristiwa secara investigatif sebagai implikasi persaingan kepentingan elite dan friksi internal di lingkar kekuasaan kabinet. Kumparan.com mengonstruksi peristiwa melalui kacamata evaluasi teknokratis atas akumulasi rekam jejak kebijakan fiskal yang kontroversial selama setahun masa jabatan. Sementara itu, Indopolitika.com membangun narasi kritis yang menyoroti kejanggalan kronologis antara pengungkapan skandal kebocoran pajak puluhan pabrik baja asing dengan keputusan pemecatan mendadak di tengah rapat resmi DPD RI. Melalui pisau analisis etika komunikasi Hindu *Tri Kaya Parisudha*, diskursus media yang beragam tersebut menyingkapkan terjadinya disonansi moralitas kekuasaan dalam praktik pemerintahan kontemporer. Terdapat keterbelahan mendasar antara kemurnian niat kenegaraan (*Manacika*), transparansi tutur kata komunikasi kepada publik (*Wacika*), dan kepatutan etis dalam eksekusi perbuatan nyata (*Kayika*). Keberanian menegakkan integritas fiskal terbukti rentan terpinggirkan ketika berhadapan dengan kompromi kekuasaan yang minim penjelasan jujur dan terbuka. Secara akademis, kajian ini memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu komunikasi dan penerangan agama Hindu dengan membuktikan bahwa penggabungan model analisis framing Barat (Pan & Kosicki) dengan filsafat etika lokal

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Nusantara (*Tri Kaya Parisudha*) mampu menghasilkan pembacaan wacana media yang holistik, kritis, dan sarat akan nilai-nilai keluhuran budi pekerti.

Daftar Pustaka

Adnyana, I. W. (2023). Kepemimpinan transformatif berbasis ajaran Tri Kaya Parisudha dalam era disrupsi. Jurnal Widya Wacana, 18(1), 45–56.

Astawa, I. N. T. (2021). Etika komunikasi politik dalam perspektif Hindu: Menakar wacana publik di era digital. Jurnal Widya Sains, 3(2), 78–89.

Chadwick, A. (2021). The hybrid media system: Politics and power (2nd ed.). Oxford University Press.

Couldry, N., & Hepp, A. (2022). The mediated construction of reality: Society, platformization, and datafication. Communication Theory, 32(1), 1–19.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Darma, Y. A. (2022). Analisis wacana kritis: Teori, model, dan aplikasinya dalam studi media. Refika Aditama.

Detik.com. (2026, 14 September). Purbaya dicopot Prabowo usai setahun jadi Menkeu. Detik Finance.

Eriyanto. (2021). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media (Cetakan ke-8). LKiS Pelangi Aksara.

Fadillah, R., & Rahmawati, A. (2023). Dramatisasi berita politik di media online Indonesia: Analisis semiotika dan framing. Jurnal Komunikasi Massa, 16(2), 112–128.

Flick, U. (2022). An introduction to qualitative research (7th ed.). SAGE Publications.

Fuchs, C. (2021). Social media: A critical introduction (3rd ed.). SAGE Publications.

Ginaya, G., Astuti, N. N. S., & Mataram, I. G. A. B. (2022). Implementasi etika Tri Kaya Parisudha dalam tata kelola kelembagaan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 6(1), 55–67.

Haryanto, I. (2021). Jurnalisme siber di Indonesia: Antara tuntutan kecepatan dan etika verifikasi. Jurnal Dewan Pers, 21(1), 12–29.

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Indopolitika.com. (2026, 15 September). Purbaya dicopot beberapa jam setelah ungkap dugaan kebocoran pajak. Indopolitika Nasional.

Kumparan.com. (2026, 14 September). Breaking news: Purbaya dicopot dari Menkeu. Kumparan Bisnis.

Kurniawan, B., & Astuti, S. I. (2021). Ekonomi politik media online di Indonesia: Konvergensi dan komodifikasi berita. Jurnal Aspikom, 6(2), 310–324.

Kusuma, R. S., & Putri, D. A. (2022). Komunikasi politik kabinet di era digital: Ketegangan antara hak prerogatif dan opini publik. Jurnal Penelitian Politik, 19(2), 145–160.

McQuail, D., & Deuze, M. (2020). McQuail's media and mass communication theory (7th ed.). SAGE Publications.

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2021). Oligarki dan regresi demokrasi di Indonesia kontemporer. Jurnal Politik Indonesia, 7(1), 23–45.

Nugroho, Y., & Syarif, A. (2022). Media concentration, oligarchy, and public discourse in contemporary Indonesia. Southeast Asian Media Studies, 4(1), 45–68.

Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political Communication, 10(1), 55–75.

Prasetyo, A., & Wibowo, H. (2023). Sentimen pasar modal terhadap dinamika pergantian menteri ekonomi di media daring. Jurnal Kajian Komunikasi, 11(1), 89–104.

Prastiwi, F., & Irwansyah, I. (2021). Analisis framing pemberitaan perombakan kabinet di media siber Indonesia. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 6(1), 89–102.

Putra, I. G. A., & Sudarsana, I. K. (2022). Etika komunikasi Hindu dalam moderasi beragama dan harmoni sosial. Jurnal Dharmasmrti, 22(1), 34–46.

Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers (4th ed.). SAGE Publications.

Santoso, B., & Hidayat, M. (2023). Konstruksi media arus utama terhadap kebijakan fiskal dan reformasi birokrasi kementerian. Jurnal Wacana Politik, 8(2), 178–192.

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026
2338-8382 (ISSN Cetak); 2798-4842 (e-ISSN)
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SN

Sobur, A. (2021). Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, semiotik, dan framing (Cetakan ke-7). Remaja Rosdakarya.

Suadnyana, I. B. P. (2021). Implementasi nilai-nilai Tri Kaya Parisudha dalam kepemimpinan birokrasi modern. Jurnal Sanjiwani, 12(2), 112–124.

Sudiarta, I. W. (2021). Epistemologi komunikasi Hindu: Refleksi filosofis atas teks dan wacana keagamaan. Jurnal Beda, 10(1), 22–35.

Suprobo, T., Siahainenia, R., & Sari, D. K. (2015). Analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti. Jurnal Komunikasi, 1(2), 119–138.

Tempo.co. (2026, 15 September). Mengapa Purbaya dicopot dari kursi Menteri Keuangan. Tempo Ekonomi.

Utami, P. (2022). Konstruksi wacana media siber terhadap reshuffle menteri ekonomi di Indonesia. Jurnal Studi Komunikasi, 6(3), 741–758.

Wahyuni, S., & Anshori, M. (2022). Analisis pembingkaian media terhadap perombakan kabinet di portal berita nasional. Jurnal Komunika, 16(1), 67–82.

Wardana, I. M. (2021). Filsafat komunikasi dan etika kekuasaan di Nusantara. Pustaka Bali Post.

Wiana, I. K. (2022). Tri Kaya Parisudha: Filsafat moral dan transformasi etika sosial keagamaan Hindu. Pustaka Hindu.

Winters, J. A. (2022). Oligarchy and democracy in contemporary Indonesia: Power, wealth, and legal capture. Asian Survey, 62(1), 11–37.

Yasa, I. K. W. P. (2022). Dialektika relasional dan etika kepemimpinan dalam perspektif komunikasi Hindu. Jurnal Sadharananikarana, 4(2), 130–145.

Yuliani, N., & Rohman, A. (2022). Validitas dan reliabilitas dalam penelitian analisis wacana dan framing kualitatif. Jurnal Metodologi Komunikasi, 5(1), 40–53.